COMPANY PROFILE

PT. ANUGRAH JAYA INDUSTRI PERKASA

MANAGEMENT & ENGINEERING CONSULTANT

0813-7698-3941

ajipofficial.id@gmail.com

DAFTAR ISI

1 Tentang Kami

2 Bisnis

4 Visi dan Misi

5 Instrumen

7 Proyek Kami

8 Direksi

9 Kontak Kami

TENTANG KAMI

PT. Anugrah Perkasa Jaya Industri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Pertanahan. Baik itu Pemetaan, Digitalisasi, Konsultasi dan lainnya.

Perusahaan kami didirikan dengan tujuan untuk memberikan solusi yang efektif dan efesien dalam membatu ATR/BPN dalam melaksanakan program-program strategis baik itu Nasional atau Daerah.

Dengan menggunakan alat dengan teknologi terbaru, kami dapat membatu pelaksanaan pekerjaan dengan lebih cepat, akurat, dan lebih hemat biaya. Kami juga memiliki tenaga terlatih dan profesional yang siap memberikan layanan terbaik mereka untuk client kami.

BISNIS

Dalam menjalankan bisnis di bidang Pertanahan ini, PT. Anugrah Jaya Industri Perkasa memiliki strategi bisnis yang kami terapkan.

- Pertama, kami terus kembangkan teknologi dan efesiensi dengan peralatan, robot dan sistem yang canggih. Cara ini terbukti dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas yang dapat kami capai dalam pekerjaan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan.

- Kedua, kami menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terutama vendor GPS, Pabrikasi alat seperti drone, fixed wing, scanner, stempel elektronik dan lainnya untuk memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan keterlibatan dengan pihak pihak profesional lainnya agar output yang dapat kami hasilkan sesuai dengan keinginan pelanggan.

BISNIS

- Ketiga, kami memiliki tim terlatih dan profesional dalam memproduksi hasil pekerjaan kami.

- Keempat, kami menjamin kerahasiaan dokumen-dokumen yang kami kerjakan dengan SOP yang ketat terhadap tim dan vendor kami. Sehingga meminimalisirkan adanya kebocoran data.

- Kelima, kami memberikan layanan purnajual yang terbaik demi kenyamanan pelanggan kami. Sehingga hasil pekerjaan yang kami keluarkan terjamin dan pelanggan pun bebas dari rasa khawatir. Secara keseluruhan, PT. Anugrah Jaya Industri Perkasa telah memiliki berbagai strategi bisnis terencana dan matang dalam menjalankan bisnis di bidang Pertanahan ini dan akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk Kantor Pertanahan dengan mengutakan kualitas, keamanan dan kepuasan

VISI & MISI

Visi

Menjadi perusahaan di bidang Pertanahan yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia dengan memberikan layanan terbaik dan solusi terbaik untuk kegiatan-kegiatan di bidang Pertanahan.

Misi

1. Memberikan layanan dengan proses yang cepat, akurat dan hemat biaya
2. Menjaga kerahasiaan data pertanahan yang kami kerjakan
3. Selalu berinovasi dalam kegiatan dibidang Pertanahan sehingga dapat meingkatkan produktifitas
4. Menjalin kemitraan yang erat dengan vendor dan client untuk memberikan hasil terbaik yang akan dikeluarkan

INSTRUMEN

Berikut kami lampirkan beberapa instrument yang kami gunakan:

Merk	Tipe	Spesifikasi	Jumlah
FUJITSU	Fujitsu SP - 1125 ADF	25 PPM 50 Sheets A4	**5 UNIT**
PLUSTEK	Plustek Smartoffice PS283	25 PPM 50 Sheets A4	**5 UNIT**
BROTHER	Brother ADS - 2200	25 PPM 50 Sheets A4	**5 UNIT**
FUJITSU	Fujitsu Fi - 7460	80 PPM A3	**2 UNIT**
FUJITSU	Fujitsu Fi - 7600	100 PPM A3	**2 UNIT**

INSTRUMEN

Berikut kami lampirkan beberapa instrument yang kami gunakan:

Merk	Tipe	
AUTEL	EVO II PRO RTK	
AUTEL	EVO MAX 4T RTK	
DJI	MAVIC 3 ENTERPRISE RTK	
NUSATECH	UAV Fixed Wing VTOL Nusatech 22 GNSS	

PROYEK KAMI

2023

No.	Nama Proyek / Kegiatan	Bulan
1	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) PM 2023 Pacitan	Maret - Agustus
2	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) PM 2023 Bondowoso	Maret - Agustus
3	PUNA guna PTSL Kabupaten Bulungan	Maret - Juli
4	PUNA guna PTSL Kabupaten Lima Puluh Kota	Maret - Juli
5	PUNA guna PTSL Kabupaten Merangin	Maret - Juni
6	Digitalisasi Kupang	Maret - Juli
7	PUNA guna PTSL Kabupaten Bandung	Maret - Juni
8	PUNA guna PTSL Kabupaten Blitar	Maret - Juli
9	PUNA guna PTSL Kabupaten Pasuruan	Maret - Juli
10	PUNA guna PTSL Kabupaten Labuan Batu	Maret - Juli
11	PUNA guna PTSL Kabupaten Aceh Tengah	Maret - Juli
12	PUNA guna PTSL Kabupaten Kapuas	Agustus - September
13	Batas Kawasan Hutan Provinsi Jambi	Juli - September
14	PUNA guna PTSL Kabupaten Bekasi	Oktober
15	Drone spraying Sinarmas	September
16	PUNA guna PTSL Kabupaten Kutai Barat	September - November
17	PUNA guna PTSL Kabupaten Panajam Paser	Oktober
18	Digitalisasi Deli Serdang	Oktober - November
19	Digitalisasi Labuan Batu	Oktober - November
20	Digitalisasi Nias	Oktober - Desember
21	Digitalisasi Simalungun	November - Desember
22	Digitalisasi Pematang Siantar	November - Desember

DIREKSI

Fadlan Hafiz Nasution

Direktur Utama

Iszam Rachmadan Eja

Direksi

Rizki Anugrah

Direksi

KONTAK KAMI

0813-7698-3941 / 0812-2170-9604

ajipofficial.id@gmail.com

Jalan Ancol Barat No. 6 Kelurahan Ciateul Kecamatan Regol, Kota Bandung

DATA PEMILIK PERUSAHAAN

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BANDUNG

NIK : 3204052903960002

Nama : RIZKI ANUGRAH
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 29-03-1996
Jenis kelamin : LAKI LAKI Gol. Darah : B
Alamat : KOMP. BUMI LANGGENG CINUNUK 34/23
RT/RW : 001/022
Kel/Desa : CINUNUK
Kecamatan : CILEUNYI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

BANDUNG
11-10-2022

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 93.853.185.2-444.000
RIZKI ANUGRAH
NIK : 3204052903960002

KOMPLEK BUMI LANGGENG CINUNUK 34 NO. 23 RT. 01 RW 22
CINUNUK CILEUNYI
KAB. BANDUNG JAWA BARAT

KPP PRATAMA MAJALAYA

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN DELI SERDANG

NIK : 1207263008960010

Nama : FADLAN HAFIZ NASUTION
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 30-08-1996
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah
Alamat : PERUMAHAN RSS DUSUN X BLOK V/20
RT/RW
Kel/Desa : BANDAR SETIA
Kecamatan : PERCUT SEI TUAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 30-08-2018

DELI SERDANG
17-06-2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 95.701.037.4-423.000
FADLAN HAFIZ NASUTION
NIK : 1207263008960010
JALAN GAMBIR ANOM BUNTU ATAS NO. 21
SUKALUYU CIBEUNYING KALER

KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING
Terdaftar : 22 Agustus 2020

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273202106960002

Nama : PINANDITA FAIZ RIFALDI
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 21-06-1996
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. DILI NO.16
RT/RW : 001/010
Kel/Desa : ANTAPANI KIDUL
Kecamatan : ANTAPANI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA BANDUNG
05-12-2017

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 42.453.229.9-429.000
PINANDITA FAIZ RIFALDI
NIK : 3273202106960002
JL DILI NO. 16 RT. 001 RW. 010
ANTAPANI KIDUL, ANTAPANI

KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Terdaftar : 21 Mei 2021

PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN AGAM

NIK : 1306021102960004

Nama : ISZAM RACHMADAN EJA
Tempat/Tgl Lahir : PADANG, 11-02-1996
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JLN CANIAGO JORONG IV SURABAYO.
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : LUBUK BASUNG
Kecamatan : LUBUK BASUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

AGAM
23-01-2019

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 90.643.934.4-202.000
ISZAM RACHMADAN EJA
NIK : 1306021102960004

JALAN CANIAGO JORONG IV
SURABAYO, LUBUK BASUNG
KAB. AGAM SUMATERA BARAT

KPP PRATAMA BUKITTINGGI

SK KEMENKUMHAM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0024130.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT ANUGRAH JAYA INDUSTRI PERKASA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CUT SARI LUFFIANA DEWI LUFTI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 28 Tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh CUT SARI LUFFIANA DEWI LUFTI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT ANUGRAH JAYA INDUSTRI PERKASA tanggal 27 Maret 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023032732107762 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT ANUGRAH JAYA INDUSTRI PERKASA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT ANUGRAH JAYA INDUSTRI PERKASA - yang berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 28 Tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh CUT SARI LUFFIANA DEWI LUFTI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Maret 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0060526.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 27 Maret 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0024130.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT ANUGRAH JAYA INDUSTRI PERKASA

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 125.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
FADLAN HAFIZ NASUTION	DIREKTUR UTAMA	-	350	Rp. 35.000.000
ISZAM RACHMADAN EJA	DIREKTUR	-	300	Rp. 30.000.000
PINANDITA FAIZ RIFALDI	DIREKTUR	-	300	Rp. 30.000.000
RIZKI ANUGRAH	KOMISARIS	-	300	Rp. 30.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Maret 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0060526.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 27 Maret 2023

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN

NOTARIS

Cut Sari Luffiana Dewi Lufti, S.H., M.Kn.

Jl. G. A. Manulang - Komplek Bentang Padalarang Regency Blok. F 3 No. 3
Ds. Jayamekar Kec. Padalarang Kabupaten Bandung Barat
Provinsi Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 26 Mei 2011 Nomor : AHU-412.AH.02.01.TAHUN 2011

~~Turunan~~/Salinan/~~Grosse~~ :

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. ANUGRAH JAYA INDUSTRI PERKASA

Tanggal : 21 MARET 2023 .

Nomor : 28.-

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. ANUGRAH JAYA INDUSTRI PERKASA

Nomor : 28.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 21-03-2023 (dua puluh satu Maret tahun dua ribu dua ----- puluh tiga) ----------

pukul 15.30 (lima belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. ----------

Berhadapan dengan saya, **CUT SARI LUFFIANA DEWI LUFTI, Sarjana Hukum**, ------- **Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, dengan dihadiri oleh ----- saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -------

1. **Tuan FADLAN HAFIZ NASUTION**, lahir di Medan, pada tanggal 30-08-1996 (tiga ---- puluh Agsutus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Pelajar/Mahasiswa bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Perumahan RSS Dusun X Blok V/20, -- Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan,- Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan 1207263008960010; ----------
2. **Tuan PINANDITA FAIZ RIFALDI**, lahir di Bandung, pada tanggal 21-06-1996 (dua --- puluh satu Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), ---------- Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Dili nomor 16, Rukun -- Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, -- Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan 3273202106960002; ----------
3. **Tuan ISZAM RACHMADAN EJA,** lahir di Padang, pada tanggal 11-02-1996 -------- (sebelas Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), ---------- Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Jalan Caniago Jorong IV Surabayo, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Lubuk Basung, ---------- Kecamatan Lubuk Basung, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda ------- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1306021102960004; ----------

---------- dan ----------

4. **Tuan RIZKI ANUGRAH**, lahir di Bandung, pada tanggal 29-03-1996 (dua puluh ------ sembilan Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Karyawan -------- Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Komplek Bumi Langgeng Cinunuk 34/23, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan 3204252903960002; ----------

- untuk sementara kesemuanya berada di Kota Bandung; ----------

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------

Para penghadap dalam tindakannya tersebut menerangkan, bahwa dengan tidak -------- mengurangi izin dari Pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk ---------- bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar ---------- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1.** ----------

1. Perseroan terbatas ini bernama : ----------

   ---------- **PT. ANUGRAH JAYA INDUSTRI PERKASA** ----------

   (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota ---------- Bandung. ----------

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam -- maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, ---- dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **Pasal 2.** ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. ----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ----------

---------- **Pasal 3.** ----------

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang : ----------

- Jasa Konsultasi, Pemetaan, Digitalisasi Validasi, Pengadaan Barang; ----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat ----------
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ----------
- PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (46100); ----------
- AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA (62019); ----------
- AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS --------- KOMPUTER LAINNYA (62029); ----------
- AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA ------ (62090); ----------
- AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA (63111); ----------
- AKTIVITAS KANTOR PUSAT (70100); ----------
- AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (70209); ----------
- AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI (71102); --------
- JASA SERTIFIKASI (71201); ----------
- JASA PENGUJIAN LABORATORIUM (71202); ----------
- ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA (71209); ----------
- AKTIVITAS FOTOGRAFI (74201); ----------
- AKTIVITAS ANGKUTAN UDARA KHUSUS PEMOTRETAN, SURVEI DAN ------ PEMETAAN (74202); ----------
- AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL (74909); ---

---------- **M O D A L** ----------

---------- **Pasal 4.** ----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp 500.000.000,00** (**lima ratus juta rupiah**), ----- terbagi atas **5.000** (**lima ribu**) saham, masing-masing saham bernilai nominal -------- **Rp 100.000,00** (**seratus ribu rupiah**). ----------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **25%** (**dua puluh lima** ------ **persen**) atau sejumlah **1250** (**seribu dua ratus lima puluh**) saham dengan nilai ----

nominal seluruhnya sebesar **Rp 125.000.000,00** (**seratus dua puluh lima juta** ------ **rupiah**), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta ---- nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir-akta ini. ----------

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut ---- keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham --- mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak - dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran ---- dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian ---------- seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap -- saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil --- oleh pemegang saham lainnya. ----------
   Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat dan ---- ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak --- untuk menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. ----------

---------- **S A H A M** ----------

---------- **Pasal 5.** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. ----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara -- Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. ----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----------
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat -------- dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat -- saham. ----------
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau- lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : ----------

a. nama dan alamat pemegang saham. ----------

b. nomor surat saham. ----------

c. nilai nominal saham. ----------

d. tanggal pengeluaran surat saham. ----------

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : ----------

a. nama dan alamat pemegang saham. ----------

b. nomor surat kolektif saham. ----------

c. nomor surat saham dan jumlah saham. ----------

d. nilai nominal saham. ----------

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ----------

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama ---- atau Direktur lainnya dan dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota -- Komisaris lainnya sesuai dengan Keputusan rapat Dewan Komisaris. ----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **Pasal 6.** ----------

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka ----- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat -- saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada ----- Direksi. ----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan ------- dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang ---- Saham berikutnya. ----------

3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, ------- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ----- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu ---- oleh Direksi untuk tiap peristiwa khusus. ----------

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang --- tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ----------

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ------- ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ----- ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **Pasal 7.** ----------

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang -------- ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ------ kuasanya yang sah. ----------

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta ---- persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang - penawaran tersebut. ----------

   Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat ------ umum Pemegang Saham. ----------

   Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan- permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui --------- Direksi. ----------

   Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya, harus ---------- menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya -------- dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan ---------- memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. --------- Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya - dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu --- 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan ----- haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada --- pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang --------

berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. --------

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari ------- dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak -- diperkenankan. ----------

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik - Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu - 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas ------ sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai - ketentuan Anggaran Dasar. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 8.** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : ----------
   a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; ----------
   b. Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ------ disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. ----------
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti ---------- keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum ------- Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----------
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : ----------
   a. Direksi menyampaikan : ----------
      - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat ---- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; ----------
      - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang ------- saham; ----------
   b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang - positif. ----------
   c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum Pemegang Saham yang telah - diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran ----

Dasar. ----------

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat -------- Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan ---------- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas ---------- pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama - tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan -- dan Laporan Keuangan. ----------

5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, -- kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan- memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----------

--TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ---

---------- Pasal 9. ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di - tempat kegiatan usahanya yang utama Perseroan. ----------

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan- terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau ------- dengan iklan dalam surat kabar. ----------

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat- Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -------- panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. ----------

4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. ----------

5. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang -- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham -------- dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. ----------

6. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab ------- apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang -- Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. ----------

CUT SARI LUFFIANA DEWI LUFTI, S.H.,M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BANDUNG BARAT

7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena --- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum ------- Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka ----- yang hadir dalam rapat. ----------

-- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --

---------- Pasal 10. ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran --- sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ------ telah dipenuhi. ----------
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak - ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat ----- Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang ---- saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung ------- dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang - Saham. ----------
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan ---------- musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang - dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan ------- dalam Undang-Undang. ----------

---------- D I R E K S I ----------

---------- Pasal 11. ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota -------- Direksi atau lebih. ----------
2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya - dapat diangkat sebagai Direktur Utama. ----------
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka ------- waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --------

Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ----------

4. Dalam hal oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota ------ Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ---------- lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi - lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ---- dan Anggaran Dasar. ----------

5. Dalam hal oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk --------- sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ----------

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---------- memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ----------

   a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); ----------

   b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; ----------

   c. meninggal dunia; ----------

   d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

---------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----------

---------- Pasal 12. ----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala --- hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak --- lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ---- kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa -------- untuk : ----------

   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk ------- mengambil uang Perseroan di Bank); ----------

   b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam ----- maupun di luar negeri; ----------

c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap --- atau kekayaan perseroan lainnya; ----------

d. menjaminkan harta kekayaan perseroan; dan ----------

e. mengikat perseroan sebagai Penjamin; ----------

- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. ----------

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi --- serta mewakili Perseroan. ----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun --- juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang ------- anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -- Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang -- yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam -------- Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 13.** ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu : ----------

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ----------

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -

c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang --------- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh --- saham dengan hak suara. ----------

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak -- untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. --------

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat ------ yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---------- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. --

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ------- usaha Perseroan. ----------

   Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu -------- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat -- hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat ------ Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara ------ anggota Direksi yang hadir. ----------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota ---- Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila-lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam ----- rapat. ----------

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---------- Apabila tidak tecapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ---------- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ----------

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan ------- menentukan. ----------

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ------- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ------

    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa --- tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----- secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----- yang hadir. ----------

    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah ---

dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ----- yang dikeluarkan. ----------

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -------- Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis --- dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan - secara tertulis, dengan menandatangani persetujuan tersebut. ---------- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama --- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 14.** ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila- diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya -- dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ----------
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara ------- Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ---------- perundang-undangan yang berlaku. ----------
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---- jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----------
4. Dalam hal oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka ----- dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ---------- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, ------- dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. ----------
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya ------ dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada --------- Perseroan, sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ----------
   a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; ----------

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); ----------

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; ----------

d. meninggal dunia; ----------

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

---------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ----------

---------- Pasal 15. ----------

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada -------- Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, berhak memasuki ---------- bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ----- oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti ------ lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak- untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----------
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang ------ segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak ------- mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris- diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ---------- Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -------- sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas ------ tanggungan Dewan Komisaris. ----------
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan ---------- wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan ---------- Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ----------

---------- RAPAT DEWAN KOMISARIS ----------

---------- Pasal 16. ----------

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, mutatis mutandis berlaku bagi -------- Rapat Dewan Komisaris. ----------

---------- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----------

---------- **Pasal 17.** ----------

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan ---------- Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun -- buku dimulai. ----------

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling ----- lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan -------- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. ----------
Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ----------

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk-dapat diperiksa oleh para pemegang saham, terhitung sejak tanggal panggilan ------ Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. ----------

---------- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** ----------

---------- **Pasal 18.** ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca ---- dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang -------- Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara -------- penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. ----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang ------- tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat ---- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi, dan dalam tahun buku selanjutnya --- Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -------- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **Pasal 19.** ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua ------- puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, hanya boleh ---------- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ------

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat -- Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----------

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk -- menutup kerugian, dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ------- harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, - setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan-perundang-undangan agar memperoleh laba. ----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 20.** ----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan ----- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : ----------

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), telah diambil ---- bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para ------- pendiri : ----------

   - penghadap **Tuan FADLAN HAFIZ NASUTION**, - sejumlah **350** (**tiga ratus lima puluh**) saham ------ dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------- **Rp 35.000.000,00** --- (**tiga puluh lima juta rupiah**). ----------
   - penghadap **Tuan PINANDITA FAIZ RIFALDI**, ---- sejumlah **300** (**tiga ratus**) saham dengan nilai ----- nominal seluruhnya sebesar ---------- **Rp 30.000.000,00** --- (**tiga puluh juta rupiah**). ----------
   - penghadap **Tuan ISZAM RACHMADAN EJA**, ----- sejumlah **300** (**tiga ratus**) saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar ---------- **Rp 30.000.000,00** ---

(**tiga puluh juta rupiah**). ----------

- penghadap **Tuan RIZKI ANUGRAH**, ----------

sejumlah **300** (**tiga ratus**) saham dengan nilai ----

nominal seluruhnya sebesar ---------- **Rp 30.000.000,00** ---

(**tiga puluh juta rupiah**). ----------

- sehingga seluruhnya berjumlah **1.250** (**seribu dua -**

ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal ----

seluruhnya sebesar ---------- **Rp 125.000.000,00** ---

(**seratus dua puluh lima juta rupiah**). ----------

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) dan pasal 14 ayat (3) ----------

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -

Komisaris, telah diangkat sebagai : ----------

DIREKSI : ----------

- **Direktur Utama** ------ : **Tuan FADLAN HAFIZ NASUTION** tersebut; ----------
- **Direktur** ---------- : **Tuan PINANDITA FAIZ RIFALDI** tersebut; ----------
- **Direktur** ---------- : **Tuan ISZAM RACHMADAN EJA** tersebut; ----------

KOMISARIS : ----------

- **Komisaris** ---------- : **Tuan RIZKI ANUGRAH** tersebut; ----------

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh ---

masing-masing yang bersangkutan. ----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

Dibuat dan diselesaikan di Kota Bandung pada hari, tanggal dan pukul seperti ----------

disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------

1. **Nyonya RINA ISMAYANTI**, lahir di Bandung pada tanggal 09-08-1978 (sembilan ----

Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di Kota -

Cimahi, Komplek Aneka Bakti Jalan Yudha Bakti nomor 22, Rukun Tetangga 007, ----

Rukun Warga 011, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Warga --------

Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------
Kependudukan 3277014908780003; ----------
---------- dan ----------

2. **Nyonya RIZA PEBLIANA**, lahir di Padang, pada tanggal 06-09-1980 (enam ----------
September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Kota -----
Bandung, Jalan Cipedes Tengah nomor 32, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ------
006, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Warga Negara Indonesia, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3273074609800001; ----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya,Notaris. -

Dibuat dengan tanpa memakai coretan, coretan beserta gantiannya maupun tambahan.-

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----------

Diberikan sebagai "**T U R U N A N**".

N o t a r i s :

CUT SARI LUFFIANA DEWI LUFTI, S.H., M.Kn.

NOMOR INDUK BERUSAHA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3003230076721

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT ANUGRAH JAYA INDUSTRI PERKASA
2. Alamat Kantor	: JL. ANCOL BARAT NO. 6, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40252
No. Telepon	: 081221709604
Email	: ajipofficial.id@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 Maret 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 April 2023

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3003230076721

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	JL. ANCOL BARAT NO. 6, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40252	Rendah	NIB	Terbit	-
2	74202	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	JL. ANCOL BARAT NO. 6, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40252	Rendah	NIB	Terbit	-
3	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	JL. ANCOL BARAT NO. 6, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40252	Rendah	NIB	Terbit	-
4	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	JL. ANCOL BARAT NO. 6, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40252	Rendah	NIB	Terbit	-
5	74201	Aktivitas Fotografi	JL. ANCOL BARAT NO. 6, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40252	Rendah	NIB	Terbit	-
6	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	JL. ANCOL BARAT NO. 6, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40252	Rendah	NIB	Terbit	-
7	63111	Aktivitas Pengolahan Data	JL. ANCOL BARAT NO. 6, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40252	Rendah	NIB	Terbit	-
8	01614	Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara	Jalan Ancol Barat, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40253	Rendah	NIB	Terbit	-
9	01614	Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara	Jalan Ancol Barat, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40253	Rendah	NIB	Terbit	-

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

10	71201	Jasa Sertifikasi	JL. ANCOL BARAT NO. 6, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40252	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
11	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	JL. ANCOL BARAT NO. 6, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40252	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
12	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	JL. ANCOL BARAT NO. 6, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40252	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
13	74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	JL. ANCOL BARAT NO. 6, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40252	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
14	71209	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	JL. ANCOL BARAT NO. 6, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40252	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
15	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	JL. ANCOL BARAT NO. 6, Desa/Kelurahan Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40252	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

KSWP

djp

Halo, ANUGRAH JAYA INDUSTRI PERKASA

KSWP
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Petunjuk Pengisian

- Modul Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) digunakan untuk pengecekan status wajib pajak
- Modul Surat Keterangan Fiskal (SKF) digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Fiskal
- Modul SKD SPDN digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Dalam Negeri
- Modul Surat Keterangan PP 23 digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Masuk dalam skema PP 23
- Modul SKJLN digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
- Modul Fasilitas Pengurang PPh Pasal 25 (PMK 114 2022) digunakan untuk permohonan Fasilitas PPh Pasal 25 sesuai PMK 114 Tahun 2022
- Modul SKB PPh Pasal 22 Impor (PMK 114 2022) digunakan untuk permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor sesuai PMK 114 Tahun 2022

PROFIL WAJIB PAJAK

NIK / NPWP16

0401609649422000

NPWP15

401609649422000

NAMA WP

ANUGRAH JAYA INDUSTRI PERKASA

ALAMAT

ANCOL BARAT - KOTA BANDUNG

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

1	NPWP	Valid
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid

NPWP

npwp.

KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA

40.160.964.9-422.000

PT. ANUGRAH JAYA INDUSTRI PERKASA

NPWP16 : 0401 6096 4942 2000

ANCOL BARAT NO. 6 RT. 005 RW. 002
CIATEUL, REGOL
KOTA BANDUNG JAWA BARAT

Tanggal Terdaftar 30/03/2023

djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

REKENING PERUSAHAAN

Bank Mandiri Cabang Martadinata, Kota Bandung

Account Statement

Account No	1310031114111 IDR ANUGRAH JAYA INDUSTR ANUGRAH JAYA INDUSTR
Period	12 April 2023 - 12 May 2023
Currency	IDR
Branch Name	AREA BANDUNG ASIA-AFRIKA
Opening Balance	9,915,000.00